

EVALUASI KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN POTENSI DESA (STUDI PADA DESA BLANKAHAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013)

Minarni

Email : minarni13@uma.ac.id

Jl. Kolam No 1 Medan Estate Kampus FISIPOL Program Studi Kepemerintahan
Universitas Medan Area

Diterima 12 Juni 2014/ Disetujui 26 Juni 2014

Abstract

Village within the framework of regional development goals is seen as an object to be built. Rural development will have implications on the progress of the region so that the concentration of rural development in the various approaches becomes important to be improved. This study aims to look at how the performance of the Institute of Rural Community Empowerment (LPMD) Blankahan Village District of Kuala Langkat Potential Increase in 2013 in the Village. This type of research is qualitative descriptive method. Source data used through interviews, literature study and documentation. Research results obtained some findings of which is the Institute's role as a facilitator of Rural Community empowerment is low this can be seen from the community participation in determining priority program proposals to be made respectively. This is evident from the results of the interview by the chairman of the village LPMD Blankahan that in determining community priorities proposed meeting attended and participated only listened but no coment. LPMD people assume can not do anything.

Keywords: Performance, Institute of Rural Community Empowerment, Rural Blankahan.

Abstrak

Desa dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 dalam Meningkatkan Potensi Desa. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh beberapa temuan diantaranya ialah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPMD desa Blankahan bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPMD tidak bisa berbuat apa-apa.

Kata kunci : Kinerja, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Blankahan.

PENDAHULUAN

Saat ini di tengah menguatnya fokus pemerintah pusat terhadap

percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah

pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Disisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang di peroleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah dan desentralisasi sudah menjadi mungkin sekali untuk mengejar ketertinggalan daerah pada berbagai bidang. Pendekatan anggaran, kegiatan serta pemberdayaan aparatur daerah menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. LPMD sebagai lembaga kemasyarakatan desa, dalam pasal 94 ayat 3 dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan "Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta

meningkatkan pelayanan masyarakat Desa".

Masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dalam kerangka partisipasi pembangunan desa mengingat minimnya sumber daya manusia pada lingkup desa yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif tersebut dapat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Dari uraian latar belakang masalah ini maka akan dilihat dilakukan evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa, Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.

TELAAH PUSTAKA Pemerintahan Desa

Desa dipahami secara umum sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan bila dilihat dalam struktur administrasi kewilayahan negara Indonesia maka desa merupakan unit yang terkecil dalam struktur tata pemerintahan. Wilayah desa di kelola oleh pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa.

Keberadaan pemerintahan desa begitu penting, disamping bertujuan untuk menata pembangunan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pada aspek lainnya pemerinyahan desa berfungsi memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa. Definisi tentang desa di jelaskan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam setiap wilayah desa terdiri dari dusun atau nama lainnya, semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu wilayah desa maka dapat dipastikan pemerintahan desa akan lebih bekerja keras untuk memenuhi keperluan masyarakat desa dari pemerintahan desa seperti urusan administrasi kependudukan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam konsep pembangunan pedesaan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan keberadaannya ialah adanya organisasi dalam unit desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami sebagai motor penggerak terjadinya transformasi informasi yang dapat mengubah keterampilan masyarakat desa pada titik yang maksimal.

Semakin maksimal keterampilan masyarakat desa maka akan berpengaruh pula terhadap laju pembangunan suatu desa. Keterampilan suatu masyarakat desa dapat dibentuk melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh masyarakat desa maupun aparatur desa, untuk memudahkan pengorganisasian pemberdayaan masyarakat desa maka keberadaan organisasi yang menaungi masyarakat desa dalam proses pemberdayaan menjadi mutlak diperlukan.

Menurut Robbins dan Judge, (2008:5) Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar,

terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Kemudian pendapat lainnya seperti yang dikemukakan Wibowo (2007 : 1) Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Organisasi-organisasi yang berada pada unit atau lingkup desa secara langsung ataupun tidak langsung turut mengubah pola berpikir masyarakat desa, melalui peran-peran yang melekat pada tujuan organisasi-organisasi yang ada maka turut menambah referensi masyarakat desa terhadap berbagai hal. Berikut ini akan dikutip pandangan menurut Wanashinge dalam Winarno (2003: 109) organisasi desa dapat berperan sebagai :

- a. Identifikasi, dimana organisasi desa dapat mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan.
- b. Agitator, dimana organisasi desa berperan untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya.
- c. Penggerak sumber daya, dimana organisasi desa dalam memobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal.
- d. Organisator, dimana organisasi desa secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan desa.

Secara umum, dapat ditemukan pada banyak pedesaan yang minim dalam hal sumber daya manusia yang terampil atau dengan kata lain dalam kumpulan masyarakat di desa, sedikit ditemukan aktor-aktor masyarakat yang terampil dalam mengorganisir organisasi yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pada kondisi ini, peran dari pemerintah desa diharapkan sebagai pemerakarsa terbentuknya aktor-aktor masyarakat desa yang terampil dalam

berorganisasi di bidang pembangunan desa. Esman dalam Eaton (1986 : 24) menyatakan bahwa pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka menuju pembangunan desa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, namun pendekatan-pendekatan yang akan digunakan akan berkaitan secara langsung dengan masyarakat desa, dengan demikian keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa menjadi kunci utama untuk menuju pembangunan desa yang bergerak secara cepat.

Keberadaan masyarakat desa tidak selalu secara otomatis akan dapat memberikan efek positif dalam proses pembangunan desa, efek positif dari masyarakat desa dapat terwujud bilamana masyarakat desa telah memahami setidaknya peran mereka dalam konsep pembangunan desa, sehingga diperlukan diskusi ataupun komunikasi-komunikasi dua arah sebagai media sosialisasi kerangka konsep pembangunan desa.

Dengan diskusi atau komunikasi dua arah yang telah terjalin antara pemerintahan desa dengan masyarakat maka selanjutnya masyarakat yang belum memahami peran mereka untuk selanjutnya di beri pemahaman secara lebih intensif sambil proses pembangunan berjalan berupa pemberdayaan masyarakat pada pembangunan desa.

Menurut Machendrawati dan Syafi'I (2001 : 29) pengembangan masyarakat secara etimologi, pengembangan adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Wiradji seperti dikutip Rahmat (2003: 54), pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan

kesadaran kritis yang dilakukan secara transformative, partisipatif, sistematis dan berkesinambungan melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk mengarah pada perubahan kondisi hidup yang semakin baik sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat di perlukan dalam ranah pembangunan daerah Dye (1992), kebijakan publik diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*". Dalam pandangan Dye ini di simpulkan kebijakan sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan suatu pelaksanaan kebijakan publik, secara umum dalam tataran implementasi akan terlebih dahulu disusun melalui program-program dalam mencapai tujuan kebijakan publik tersebut.

Program dalam pandangan Jones (1984) adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dengan merujuk pada teori Jones, maka bisa dikatakan program menjadi wajib untuk di ciptakan sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari suatu kebijakan yang diambil atau dengan arti lain program sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan kebijakan seperti yang di utarakan oleh Jones.

Kinerja

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya akan bergantung daripada apa yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi, semakin meningkat kinerja yang diberikan oleh SDM pada suatu organisasi maka akan semakin cepat pula organisasi mencapai tujuannya.

Hasil kerja suatu organisasi pada umumnya disebut dengan istilah kinerja,

kinerja menurut Peter Jennergren dalam Nystrom dan Starbuck (1981: 43) makna dari performance (kinerja) adalah pelaksanaan tugas-tugas secara aktual.

Kinerja yang maksimal selalu diharapkan dapat terlaksana oleh setiap organisasi, pencapaian kinerja maksimal biasanya begitu diharapkan oleh pemimpin pada suatu organisasi. Antara kinerja maksimal terhadap peningkatan capaian kerja organisasi memiliki korelasi yang kuat untuk meletakkan target-target selanjutnya dari organisasi. Namun kinerja tidak selalu akan berdampak seperti apa yang diharapkan atau dengan kata lain kinerja terjadi namun tidak begitu sesuai bagaimana semestinya sehingga kinerja perlu diukur efektivitasnya.

Menurut Corrado (2004:135), efektivitas kerja adalah fungsi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik yang digunakan perusahaan dengan konsisten. Bentuk-bentuk konsistensi ini sebagai sumber kekuatan organisasi dan sebagai cara untuk memperbaiki kinerja dan efektivitas organisasi.

Menurut Pabundu (2006:16), efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen yang efektif disertai dengan manajemen yang efisien. Siagian (2002:151) mengatakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, cara melaksanakan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam menginterpretasi data dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan

Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di desa, selain itu juga peran LPMD diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan seiring dengan partisipasi masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang Desa Blankahan
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Blankahan.

LPMD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal) Desa Blankahan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Desa Blankahan.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat Desa Blankahan.
- e. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. Penumbuh kembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- g. Penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- h. Pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif;
- i. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Analisis Kinerja LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada

sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Untuk mengetahui seberapa besar kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan (Jurnal Firana, Batam 2014). Untuk mengetahui peran masyarakat dalam LPM Kelurahan Karas ada beberapa indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator

Peran LPMD sebagai fasilitator di desa adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPMD selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat di desa. Peran LPMD di Desa Blankahan memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPMD didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD dan juga perusahaan disekitar desa.

Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di desa blankahan. Agar dapat menjadi

fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang dikaji didalamnya sebagai berikut :

a. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan desa mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat desa dan seterusnya.

Agar mendapatkan informasi yang jelas tentang masyarakat ikut merencanakan pembangunan, maka penulis mengajukan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Selama ini apakah Bapak/Ibu pernah ikut merencanakan pembangunan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang akan di laksanakan di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan sebagai berikut :

“Pernah, karena sebelum program itu turun di desa yang biasanya harus diajukan dari tingkat bawah dulu dengan diadakan Musrenbang dusun dan desa dan seterusnya”. (Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Blankahan).

Masyarakat yang aktif seperti kutipan wawancara diatas di dalam pembangunan di daerahnya akan mempercepat kemajuan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Hal

ini juga karena partisipasi masyarakat sangat tinggi, dimana mereka tidak harus digerakkan terlebih dahulu atau diajak untuk memberikan perhatiannya kepada pembangunan termasuk dalam merencanakan kegiatan LPMD desa Blankahan. Ikut merencanakan pembagunan bukan hanya pada bidang fisik tetapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga dapat disampaikan melalui LPMD desa Blankahan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan LPMD desa Blankahan. Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Pernah ikut, masalah di desa Blankahan”. (Wawancara dengan masyarakat desa Blankahan).

Masyarakat yang aktif di dalam menggerakkan kemajuan pembangunan desa memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya LPMD desa Blankahan, Untuk memperkuat data maka ditanyakan secara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD desa Blankahan) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program LPMD di desa Blankahan? Adapun jawaban yang diberikan :

”Partisipasi masyarakat sangat berkurang dalam menjalankan program LPMD karena kurang kesadaran dari masing-masing individu, zaman sekarang rasa kebersamaan dan gotong royong sudah sangat berkurang, hal itu dikarenakan masyarakat menganggap aparat atau lembaga sudah digaji pemerintah dan mereka menganggap itu memang sudah menjadi tugas mereka”. (Wawancara dengan Ketua LPMD, Fasilitator desa Blankahan)

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator melalui LPMD desa Blankahan sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran untuk merencanakan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat.

b. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik di tingkat desa Blankahan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindaklanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka diberikan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam menentukan prioritas dalam penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di desa Blankahan? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua Informan sebagai berikut :

“Yang saya lakukan dalam menentukan prioritas dalam penyelenggaraan program desa Blankahan hanya untuk kepentingan orang ramai atau masyarakat umum.”. (Wawancara dengan anggota LPM).

Masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LPMD antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku LPMD desa Blankahan. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat dibutuhkan masyarakat itu yang di prioritaskan untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah diprogramkan pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga”. (Wawancara dengan anggota desa Blankahan).

Kemudian didukung pula oleh jawaban yang disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan LPMD desa Blankahan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Program prioritas dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Musrenbang tingkat dusun dan ditingkat desa yang dilakukan setahun sekali”. (Wawancara Tokoh Pemuda desa Blankahan).

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka diberikan wawancara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPMD, Ketua LPM desa Blankahan) dengan pertanyaan yang diberikan sebagai berikut : Menurut Bapak apakah program LPMD ini benar-benar dibutuhkan atau tidak di desa Blankahan ? Jawaban yang diperoleh yaitu :

"Sebenarnya sangat di butuhkan, hanya saja terkadang masyarakat no coment dengan program LPMD. Mereka menganggap LPMD tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya pemerintah desa yang berbuat, padahal disamping pemerintah desa Blankahan ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh Pemerintah". (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Ketua LPMD Desa Blankahan).

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maka, penulis mencoba menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPMD desa Blankahan bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPMD tidak bisa berbuat apa-apa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator

LPMD sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPMD desa Blankahan mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.. Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki

pengaruh yang kuota dalam proses pembangunan kelurahan.

a. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan

Kegiatan LPMD tidak akan berjalan bila tidak adanya peran serta dari masyarakat, sebab masyarakat tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada orang yang menggerakkan. Kebijakan Pemerintah melalui LPMD desa Blankahan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di desa tempat mereka tinggal. Masyarakat yang ikut dalam rapat merupakan utusan dari dusun masing-masing sebagai perwakilan untuk membawakan aspirasi masyarakat desa tentang program-program pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh anggota masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan LPMD yang telah disepakati di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang partisipasi masyarakat ikut di dalam rapat yang diadakan LPMD Desa Blankahan, penulis memberikan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti rapat yang diadakan LPMD di Desa Blankahan Kecamatan Kuala ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan bervariasi sebagai berikut :

"Ya, yang diadakan LPMD yaitu rapat yang dibahas program apa saja yang akan di lakukan di desa Blankahan "(Wawancara dengan anggota LPMD).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa mereka selalu menghadiri rapat agar dapat mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di desa Blankahan. Selanjutnya penulis juga meminta pernyataan dari informan

dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

“Pernah, karena saya adalah kepala dusun setempat yang ikut berperan dalam kegiatan LPMD.”. (Wawancara dengan kepala dusun).

Dari kutipan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa warga yang bersangkutan mengikuti yang diadakan LPMD desa Blankahan disebabkan karena mereka menyadari bahwa program yang akan diadakan pemerintah ini untuk kemajuan bagi daerahnya. Hal ini mengindikasikan rasa tingkat partisipasi warga tinggi. Masyarakat yang ikut dalam rapat dan mengetahui adanya kegiatan rapat yang akan di laksanakan karena disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri tentang pentingnya LPMD desa Blankahan untuk mengadakan rapat, guna pembangunan di desanya.

Untuk memperkuat data diberikan wawancara secara langsung kepada Fasilitator LPMD desa Blankahan (Key Informan) dengan pertanyaan yang diajukan : “Menurut Bapak apakah masyarakat pernah mengikuti setiap diadakannya rapat LPMD di desa Blankahan Kecamatan Kuala ? Adapun jawaban yang diperoleh yaitu :

“Menurut saya pernah, masyarakat yang ikut dalam rapat ditingkat Kecamatan adalah hanya mereka yang mewakili desa yang dipilih dalam musyawarah desa, yang duduk sebagai perwakilan mengusulkan beberapa kebutuhan di kelurahannya masing-masing, seperti sarana dan prasarana yang belum ada di desa di tempat mereka tinggal”. (Wawancara dengan Fasilitator LPMD desa Blankahan).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peran LPMD sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga yang di tunjuk Pemerintah telah mengadakan rapat di desa Blankahan.

b. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan juga harus menerima informasi termasuk sosialisasi tentang kegiatan yang akan dibuat oleh LPMD. Namun kegiatan pembangunan yang dibuat tidak akan berjalan jika masyarakat tidak ikut memberikan informasi tentang pembangunan yang akan dibuat maupun memberikan informasi yang didapat kepada orang lain yang tidak hadir pada saat rapat LPMD desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Untuk mendapatkan informasi penulis memberikan wawancara kepada semua informan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan yaitu : Selama berjalannya program LPMD, apakah Bapak/Ibu pernah memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan bervariasi sebagai berikut

“Kami sering memberikan informasi kepada masyarakat, contohnya untuk membentuk organisasi atau kelompok karena bantuan Pemerintah sekarang harus berkelompok.”. (Wawancara dengan masyarakat desa Blankahan).

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan sudah di seleggarakannya sosialisasi LPMD dalam memberitahukan apa-apa saja yang

menjadi tujuan akan diadakannya LPMD ini. Sehingga sebahagian warga telah mengetahui informasi tentang LPMD desa. Anggapan mereka, kegiatan apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk memajukan desa mereka pasti diberi dukungan.

Keterangan tambahan kami peroleh dari pelaku LPMD desa Blankahan lainnya yaitu salah satu Tokoh Masyarakat yang ada di desa Blankahan. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Iya, tetapi karena keterbatasan LPMD, informasi yang diterima oleh masyarakat pun hanyalah sekedar informasi, tetapi tidak berjalan dengan baik”.. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Blankahan).

Dari kutipan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa sebagai Tokoh Masyarakat di desa Blankahan sangat tertarik dengan program Pemerintah mengenai LPMD desa. Karena dia, sebagai Tokoh Masyarakat harus selalu memberikan informasi kepada masyarakat desa Blankahan. Agar tidak ketinggalan informasi ia selalu menghadiri rapat apabila diundang.

Hal sikap diatas mengindikasikan bahwa masyarakat desa memiliki kesadaran yang tinggi untuk pembangunan di desanya. Ia bahkan tidak mau ketinggalan informasi.

Semua masyarakat ketika diadakan rapat harus memberikan partisipasinya, atau mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPMD desa melalui musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan merupakan kesukarelaan yang diberikan secara pribadi oleh setiap orang yang melihat dan mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan LPMD. Kemudian diperkuat pula keterangan yang

diberikan oleh Key Informan selaku fasilitator LPMD. Dengan pertanyaan sebagai berikut ? Apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan program LPMD. Jawaban yang diperoleh yaitu :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LPMD, sumber daya masyarakat desa Blankahan masih rendah dan kurang terorganisirnya masyarakat secara baik”.. (Wawancara dengan Ketua LPMD desa Blankahan).

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program, maka tidak mendapatkan informasi LPMD Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator kurang berjalan hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya dari orang-orang yang aktif di desa saja dan pihak-pihak yang peduli dengan pembangunan yang dibuat melalui LPMD Desa termasuk juga kurangnya sosialisasi bagi semua masyarakat desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator.

Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis (Jurnal Firana, 2014).

a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun
Pelaksanaan pembangunan di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan di dukung juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang dibuat adalah dengan ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi yang ada di masing-masing desa. Kebijakan Pemerintah melalui LPMD adalah bertujuan memberdayakan semua masyarakat. Untuk memperoleh data berkaitan dengan permasalahan tersebut, diberikan wawancara secara langsung kepada semua Informan. Jawaban yang diberikan dari informan sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dan bergabung di dalam membangun desanya serta mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh LPM Kelurahan, seperti halnya yang bertolak belakang dikatakan oleh salah seorang Ibu yang pernah ikut berpartisipasi dengan pertanyaan sebagai berikut : Berikan penjelasan apakah selama ini Bapak/Ibu sudah memanfaatkan tempat yang sudah dibangun LPM Kelurahan Karas ? Adapun jawaban semua informan mempunyai persamaan, yaitu :

“Iya, contohnya perbaikan jalan yang berlubang atau rusak dan memanfaatkan gedung serbaguna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan pemerintah desa dan warga sekitarnya”. (Wawancara dengan staf di kantor Kepala Desa Blankahan).

Program LPMDesa merupakan program yang ditujukan untuk desa maka perlu partisipasi masyarakat desa untuk ikut bekerja di dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa seperti perbaikan jalan jembatan, pembangunan Posyandu, penyediaan sarana MCK dan lainlain yang telah dinikmati oleh masyarakat desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna desa Blankahan yang mengatakan :

“Sudah, salah satunya MCK yang dibangun pas di lokasi tempat saya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat”. (Wawancara dengan Ketua Karang Taruna desa Blankahan).

Dari kutipan-kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh warga yang ada di desa Blankahan telah menikmati hasil pembangunan yang ada di desa mereka. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa warga setempat dapat memanfaatkan bangunan yang telah dibuat.

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas diberikan wawancara langsung kepada Fasilitator LPMD selaku Key Informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang dibangun oleh LPMD di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ? Adapun jawaban yang diperoleh sebagai berikut :

”Menurut penilaian saya masyarakat sudah maksimal memanfaatkan pembangunan, mayoritas prasarana sosial dasar yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat desa Blankahan”. (Wawancara dengan Fasilitator LPMD Desa Blankahan).

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

c. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing desa yang telah dibuat ditunjukkan dengan mereka ikut merawat semua pembangunan yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya program LPMD yang telah berjalan di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Perawatan pembangunan ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan, antara lain : Jalan, Jembatan, Posyandu dan MCK Jika hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak akan memperoleh fasilitas dari bantuan pemerintah LPM Desa. Untuk memperoleh data maka diberikan wawancara kepada informan. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan hampir sama.

Partisipasi masyarakat di dalam perawatan pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakatlah yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat, berikut kutipan wawancaranya :

“Iya mau, tetapi hanya sebagian saja karena rasa memiliki tersebut kurang, mereka berfikir jika nanti fasilitas yang sudah disediakan rusak, toh Pemerintah bantu lagi. Mereka tidak merasa rugi karena mereka anggap itu bukan uang dari mereka”. (Wawancara dengan sekretaris desa Blankahan).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat belum menyadari untuk merawat bangunan yang telah di bangun. Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Tokoh Pemuda yang menjelaskan bahwa :

“Kurang, masyarakat desa kurang atau sebagian besar hanya memanfaatkan dan urusan pemeliharaan di serahkan kepada Pemerintah”. (Wawancara dengan Tokoh Pemuda desa Blankahan).

Dari kutipan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa tingkat partisipasi untuk merawat bangunan yang telah dibuat masih rendah. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara di atas. Hal senada juga di utarakan oleh seseorang warga yang ada di desa Blankahan, berikut kutipan wawancaranya :

“Itulah yang menjadi kendala terbesar dilingkungan masyarakat kami, bangunan yang sudah dibangun sudah difasilitasi. Jangankan mau melaksanakan kewajiban mereka menjadi warga yang baik, malah sebagian besar mereka mengabaikan program atau fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah”. (Wawancara dengan Ketua Karang Taruna desa Blankahan).

Untuk memperkuat data maka diberikan wawancara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPM) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, apakah Masyarakat desa Blankahan mau ikut merawat pembangunan yang telah dibuat oleh LPM Desa Blankahan? Adapun jawaban yang diperoleh yaitu :

“Ya, memang harus seperti itu maksudnya setelah selesai pembangunan dan di dalam musyawarah desa serah terima masyarakat membentuk satu tim yang dinamakan dengan tim pemantau

atau dikenal dengan TP3". (Tim Pemelihara, Pelestarian Pembangunan)". (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Blankahan).

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di desa Blankahan dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002). Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang

dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

a. LPMD Desa Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan

Peran masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMD yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan di wilayah di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu di dalam pelaksanaan kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu LPMD sendiri semestinya melakukan Pemantauan, Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPMD tersebut.

Untuk mengetahui seberapa jauh LPMD melaksanakan fungsinya maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai bahan wawancara sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu apakah selama berjalannya program LPMD di desa Blankahan ada pemantauan atau pengawasan oleh anggota LPMD ?

“Menurut pribadi saya, selama ada LPMD disini tidak ada melakukan pengecekan secara berkala, baik bangunan-bangunan yang telah di bangun, mereka anggota LPMD melakukan pengecekan di saat awal, berjalannya kegiatan dan berakhirnya kegiatan dan setelah selesai proses itu semua sama sekali tidak ada”, (Wawancara dengan warga desa Blankahan).

Program LPMD ini merupakan program yang ditujukan untuk desa maka perlu partisipasi masyarakat desa untuk ikut bekerja di dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa seperti pembangunan Perbaikan Jalan Jembatan Posyandu dan MCK yang telah dinikmati oleh masyarakat desa Blankahan Kecamatan Kuala. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh salah satu Kepala Dusun di Desa Blankahan yang mengatakan :

”Sebagian besar pembangunan fisik yang telah di bangun di daerah kami, ya begitu adanya, berjalan dengan semestinya. Sebagai Kepala Dusun saya belum pernah melihat anggota atau ketua LPMD melakukan secara langsung di lapangan jika pembangunan tersebut sudah selesai dibangun. (Wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Blankahan).

Untuk memperoleh data yang lebih kuat maka penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada Key informan (Fasilitator LPMD) berkaitan dengan pertanyaan : Sebagai Fasilitator atau pendamping program LPM apakah ada pemantauan dari anggota LPM di Kelurahan Karas ? Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut :

”Nah ini masalahnya, selama ini memang tidak pernah ada pemantauan

yang dilakukan oleh fasilitator, sebab disini juga tidak ada hukuman yang berat atau tidak ada aturan yang mengikat dari pihak berwenang. Yang penting sudah melakukan apa yang di programkan, terlepas itu bagus atau tidaknya tergantung masyarakat yang menanggapi”. (Wawancara dengan Fasilitator Ketua LPMD Desa Blankahan).

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator desa yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.

b. LPM Kelurahan Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan.

Kegiatan LPMD desa Blankahan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPMD itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan di masing-masing desa. Untuk itu penulis mengajukan pertanyaan kepada Informan dan Key Informan sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu apakah selama berjalannya program LPMD di

desa Blankahan ada Evaluasi terhadap Program Pembangunan ?

"Baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang menentukan, sari pihak LPMD tidak ada melakukan pengecekan kembali seperti di utarakan pertanyaan tersebut". (Wawancara dengan kepala dusun di Desa Blankahan).

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu masyarakat desa Blankahan :

"Setau saya, selama saya tinggal di daerah ini belum ada kegiatan evaluasi yang di lakukan, apa yang di perbuat itu lah yang masyarakat terima, sebab masyarakat di sini kurang mengambil tau tentang adanya kegiatan di daerah nya sendiri".

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas diberikan wawancara langsung kepada Fasilitator LPMD selaku Key Informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Berapa lama pemantauan tersebut berjalan ? Adapun jawaban yang diperoleh sebagai berikut :

"Jika tidak ada pemantauan sudah tentu tidak ada jangka waktu yang dilakukan di LPMD tersebut". (Wawancara dengan Ketua LPMD desa Blankahan)

Dari kutipan wawancara di atas terlihat jelas bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Tidak di jalankan sama sekali. Setelah terjadi pembangunan dan sampai selesai tidak dilakukan pengevaluasian oleh anggota atau Ketua LPMD itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Blankahan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPMD desa Blankahan bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPMD tidak bisa berbuat apa-apa.
- 2) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPMD Desa untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peran LPMD sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga yang di tunjuk Pemerintah telah mengadakan rapat di desa Blankahan rapat mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan-hambatan yang di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- 3) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di desa Blankahan dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator di desa Blankahan yang

mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan adalah dimana Peran LPMD sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator terdapatnya hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh tanggapan dari masyarakat desa Blankahan itu sendiri. Dimana Peran LPMD sudah melakukan tugas nya sesuai dengan acuan LPMD tetapi terjadi tidak sesuai yang seharusnya terjadi. Contohnya dalam undangan rapat, tidak memberikan solution yang terbaik bagi desanya sendiri, kurangnya rasa kepedulian terhadap program pembangunan yang telah dibangun dalam memelihara dan merawatnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah desa Blankahan maupun Pemerintah Kecamatan Kuala untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga LPMD tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan LPMD di desa. Diharapkan kepada fasilitator LPMD agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam LPMD desa Blankahan baik kaum laki- laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di desa Blankahan .

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan, peran akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator di desa Blankahan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini. Jadi Penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa Peranan LPMD di desa Blankahan sudah baik dan berjalan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun respon dari masyarakat di desa itu sendiri yang kurang menanggapi Program dari Pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Corrado, Frank. M. 2004, Berkomunikasi Dengan Karyawan, Cetakan Pertama, PPM : Jakarta.
- Dye, Thomas R., 1992. Understanding Public Policy. New Jersey : Englewood Cliffs
- Eaton, Joseph W. 1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep Ke Aplikasi, UI Press, Jakarta.
- Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit. Bumi Aksara. Jakarta.

- Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Rajawali Pres
- Kodoatie, Robert, 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafi'i. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam, Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyono, Deddy. 2001. Perencanaan dan Pengendalian Program pembangunan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. Hand Book of Organization Design. Oxford : University Press
- Pabundu, Moh. Tika. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Rahmat, Abdul. 2003. Andragogi dan Pengembangan Masyarakat, Jurnal PMI Vol 1 No. 1. September.
- Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja, Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2003, Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Presindo. Jakarta
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.